

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. Hatta, 2012, *Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Amiruddin, *et al.*, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Coke, Edwardo, 1797, *The Second Part of The Institutes of The Laws of England*, Brooke, London.
- Joshua Dressler, 1997, *Understanding Criminal Procedure*, Matthew Bender, New York.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Ohlin, Lloyd E., dan Frank J. Remington, 1993, *Discretion in Criminal Justice : The Tension Between Individualization and Uniformity*, State University of New York Press, Albany.
- Pangaribuan, Luhut M. P., 2013, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017*, Jakarta.

- _____, 2018, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018*, Jakarta.
- _____, 2019, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019*, Jakarta.
- _____, 2020, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020*, Jakarta.
- _____, 2021, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021*, Jakarta.
- _____, 2022, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nelson, Febby Mutiara, 2020, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Nurdin, Ismail, 2019, *Metode Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Bandung.
- Rauxloh, Regina, 2010, *Plea Bargaining in National and International Law*, Routledge, London.
- Reichel, Philip L., 2013, *Comparative Criminal Justice System : A Topical Approach*, Pearson Education Inc., New Jersey.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta.

Santoso, Topo, 2001, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok.

Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Terrill, Richard, 2015, *World Criminal Justice Systems*, Routledge, New York.

The Asia Foundation, 2001, *Survey Report on Citizen's Perceptions of the Indonesia Justice Sector-Preliminary Findings and Recommendation*, The Asia Foundation, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, Aloysius, dan G. Widiartana, 2021, *Menuju Hukum Acara Pidana Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 2, April 2022.

Alschuler, Albert W., "Plea Bargaining and Its History", *Columbia Law Review*, Volume 79, No. 1, 1979.

Bagaskoro, Ladito R., "Rekonseptualisasi Jalur Khusus dalam Rancangan KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Arena Hukum*, Volume 14, Nomor 1, April 2021.

Borisov, Genadij A., *et. al.*, "The Place of the Russian Legislation in the Modern Legal System", *Revista Publicando*, Vol. 5, No. 16, 2018
Chattaraj, Abir, "Justice Delayed-Justice Denied – The Right to Speedy Trial in India", *SSRN Electronic Journal*, September 2011.

- Falasifah, Umi, *et. al.*, “Tinjauan tentang Pembaharuan KUHAP sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Gunarto, Marcus Priyo, “Faktor Historis, Sosiologis, Politis, dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP”, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013.
- Hairi, Prianter Jaya, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2018.
- Hamzah, Chandra M., “Ketiadaan Proses Penyelidikan dalam RUU KUHAP”, *Jurnal Teropong*, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2014.
- Harvard Law Review Association, “The Unconstitutionality of Plea Bargaining”, *Harvard Law Review*, Volume 83, No. 6, April 1970.
- Hiariej, Eddy O. S., “Criminal Justice System in Indonesia : Between Theory and Reality”, *Asia Law Review*, Volume 2, No. 2, Desember 2005.
- Krisnawati, Dani, dan Niken Subekti Budi Utami, “Penanganan Terhadap Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020
- Langbein, John H., “Understanding the Short History of Plea Bargaining”, *Law and Society Review*, No. 13, 1979.
- Latifah, Marfuatul, “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014.
- Nelson, Febby Mutiara, Topo Santoso, “Principle of Simple, Speedy, and Low Cost Trial and The Problem of Asset Recovery in Indonesia”, *Indonesia Law Review*, Volume 11, Number 2, Article 4, Tahun 2021.
- Packer, Herbert L., “Two Models of the Criminal Process”, *University of Pennsylvania Law Review*, Volume 113, No. 1.
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, “Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Volume 33, Nomor 2, Tahun 2021.
- Pangaribuan, Luhut M. P., “Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) Dalam rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Teropong*, Volume 1, Agustus 2014, hlm. 14-15.
- Purnama, Panji, dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem

Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10, Nomor 1, April 2021.

Ramadhan, Choky R., “Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHP”, *Jurnal Teropong*, Volume 1, Agustus 2014.

_____, *et. al.*, “Konsep dan Penerapan *Plea Bargain* di Beberapa Negara”, *Jurnal Teropong*, Volume 3, Juli-Desember 2015.

Riyanto, Tiar Adi, “Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Lex Renaisan*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021.

Ruchoyah, “*Legal Problem Solving* Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep *Plea Bargaining* Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien”, *Jurnal Hukum Legal Spirit*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018.

Semukhina, Olga B., dan K. Michael Reynolds, “*Plea Bargaining Implementation and Acceptance in Modern Russia: A Disconnect Between the Legal Institutions and the Citizens*”, *International Criminal Justice Review*, Vol. 19, No. 4, Desember 2009.

Solomon Jr., Peter H., “*Plea Bargaining Russian Style*”, *Demokratizatsiya*, Vol. 20, No. 3, 2012.

Strang, Robert R., “More Adversarial, but not Completely Adversarial : Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code”, *Fordham International Law Journal*, Volume 32, Issue 1, Article 13, 2008.

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus “, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

Walker, Samuel, “Origins of the Contemporary Criminal Justice Paradigm : The American Bar Foundation Survey, 1953-1969”, *Justice Quarterly*, Volume 9, No. 1, March 1992.

Hasil Penelitian/Skripsi/Tesis/Disertasi

Ariyani, Naili, 2020, *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

- De Jong, K.A.W.M., 2015, *Snel, Eenvoudig en Oonkostbaar : Over continuïteit en verandering in de aard en de inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015*, Disertasi, University of Amsterdam.
- Fatkhiyah, Siti Natasha, 2019, *Penyelesaian Perkara Pidana yang Diperiksa Dengan Acara pemeriksaan Singkat di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 52-53.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeiP), 2010, *Pembatasan Perkara-Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, efisien, dan Berkualitas*, Hasil Penelitian, LeiP, Jakarta.
- Maulana, Aby, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan Plea Bargaining System pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Muhlizi, Arfan Faiz, *et. al.*, 2017, *Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Hukum Acara Pidana*, Hasil Penelitian, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Nelson, Febby Mutiara, 2019, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan : Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Nisa', Intan Khoirun, 2017, *Analisis terhadap Penerapan Sistem Jalur Khusus (Plea Bargaining System) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi terhadap Pasal 199 RUU KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Pangestu, Wiratih Dwi, 2008, "Pengaturan Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Purwolaksono, Didik Endro, *et. al.*, 2010, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Naskah Akademik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.
- M. Rizqi, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Penuntut Umum dalam Menentukan Hukum Acara Pemeriksaan Singkat Demi Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rohman, Ria Nuryani, 2020, *Konsep Plea Bargaining System Dihubungkan dengan Asas Peradilan Cepat dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Van Dapperen, Charisma Angelina, 2022, "Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Pada Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Makalah/Pidato

Suartha, I Dewa Made, "Pembaharuan Kepolisian dan Kejaksaaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Makalah*, Seminar "Keberadaan Hukum Acara pada Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 26 Mei 2017.

Artikel dalam Antologi dengan Editor

Hodgson, Jacqualine, "Conceptions of the Trial in Inquisitorial and Adversarial Procedure", dalam A. Duff, *et. al.*, 2006, *Trial on Trial Volume 2 Judgement and Calling to Account*, Hart Pub, Oxford.

Internet

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Presiden dan DPR Didesak Bahas RUU KUHP", https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=631:presiden-dan-dpr-didesak-bahas-ruu-kuhp&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179&lang=en, diakses 24 Mei 2023.

Institute for Criminal Justice Reform "Memperkuat Rancangan KUHP yang Pro Pemberantasan Korupsi, Transparan, dan Akuntabel", <https://icjr.or.id/memperkuat-rancangan-kuhp-yang-pro-pemberantasan-korupsi-transparan-dan-akuntabel/>, diakses pada 25 Mei 2023.

Nyoman Serikat Putra Jaya, "Catatan Atas RUU KUHP", <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/25/02044788/Catatan.atas.RUU.KUHP?page=all>, diakses pada 13 Agustus 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1978).

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana versi 11 Desember 2012, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 123/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XV/2017